

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian sebelumnya

Alfian & Sabeni (2013) bertujuan untuk memprediksi faktor yang menjadi determinan konservatisme akuntansi. Teori Agensi dan Teori Akuntansi Positif menjadi dasar dari penelitian ini. Variabel prediktor yang diteliti adalah *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan kesempatan tumbuh. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *leverage*, intensitas modal, dan kesempatan tumbuh mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi secara signifikan. Sementara itu, variabel ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik belum mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi secara signifikan.

Choiriyah & Almilia (2016) melakukan penelitian terkait dengan faktor yang diduga mempengaruhi konservatisme akuntansi. Faktor tersebut adalah profitabilitas, likuiditas, dan tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian ini merujuk pada *grand theory* dan *Positive Accounting Theory* (PAT). Dalam penelitian ini, relevansi PAT adalah menjelaskan serta memprediksi konsekuensi dari alternatif tertentu yang dipilih oleh manajer. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel konservatisme akuntansi adalah akrual. Dari hasil uji data, diperoleh temuan bahwa variabel profitabilitas dan kesulitan keuangan berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel likuiditas bukan menjadi determinan variabel konservatisme akuntansi.

Septian & Anna (2014) melakukan penelitian yang mencoba untuk memprediksi variabel konservatisme akuntansi. Faktor yang diduga mampu memprediksi konservatisme akuntansi adalah kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, *debt covenant*, dan *growth opportunities*. Penelitian ini berhasil memperoleh bukti empiris bahwa variabel kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Sementara itu, variabel *debt covenant* dan *growth opportunities* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian Dewi & Suryanawa (2014) menguji variabel struktur kepemilikan manajerial, *leverage*, dan *financial distress* sebagai variabel prediksi atas konservatisme akuntansi. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial dan *leverage* mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi. Arah positif signifikan ditunjukkan oleh kedua variabel tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa variabel *financial distress* mengindikasikan pengaruh negatif signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian Pratanda & Kusmuriyanto (2014) meneliti variabel *Good Corporate Governance*, likuiditas, profitabilitas dan *leverage* sebagai determinan konservatisme akuntansi. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage* mengindikasikan pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Disamping itu, variabel kepemilikan institusional dan likuiditas belum mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi secara signifikan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan mencoba menjelaskan tentang masalah agensi yang timbul karena adanya konflik kepentingan investor, kreditur, dan manajer. Konflik yang dimaksud dapat dilihat dari kebijakan dividen, pendanaan dan kebijakan investasi. Informasi tentang perusahaan lebih banyak diketahui oleh manajer (*agent*) sebagai pengelola dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*). Sehingga manajer tidak selalu bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori keagenan berfokus pada hubungan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik perusahaan biasanya diistilahkan sebagai prinsipal sedangkan pihak manajemen yang mendapat mandat dari pemilik disebut agen. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak prinsipal dan agen harus saling menguntungkan, apabila dari kedua pihak mentaati komitmen yang sudah disepakati yang tertuang dalam kontrak kerja. Pihak agen dituntut untuk mencurahkan kemampuan profesionalnya dalam mengelola perusahaan. Sedangkan dari pihak prinsipal berkewajiban memberikan *fee* kepada pihak agen sebagai balas jasa.

Dari sudut pandang teori agensi, pemilik perusahaan (*principal*) membawahi manajer (*agent*) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Prinsipal dan agen sama-sama merupakan pihak yang mempunyai kepentingan pribadi

masing-masing. Agen tidak akan melakukan upaya yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini dapat disebabkan karena agen memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraannya. Adanya perbedaan kepentingan ini yang nantinya akan berakibat menimbulkan asimetri informasi dan juga konflik kepentingan antara agen dan principal, dimana masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri (Arrazzaq, 2017).

Penelitian ini menjadikan teori keagenan sebagai dasar asosiasi dari variabel-variabel yang memprediksi konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen yang tercermin dalam laporan keuangan. Sehingga dapat mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) untuk kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan berfokus pada bertambahnya hasil keuangan dan investasi di perusahaan, sedangkan manajer akan berfokus pada komposisi keuangan yang diberikan oleh perusahaan atas prestasinya. Hubungan teori keagenan dengan konservatisme dapat mengurangi biaya agensi, meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan, serta para pemegang saham menginginkan manajemen perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing (Lafond & Watts, 2008).

Good Corporate Governance berkembang dengan bertumpu pada *agency theory*, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemegang saham pada perusahaan, bahwa manajer akan bekerja dengan baik dan memberikan

keuntungan bagi pemegang saham, sehingga kebijakan terkait pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi lebih komperhensif, tidak terlalu agresif atau terlalu konservatis.

2.2.2 Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts (2003) konservatisme adalah prinsip kehati-hatian dimana manajemen lebih memiliki preferensi untuk mengantisipasi kemungkinan buruk daripada kemungkinan baik. Prinsip tersebut akan tercermin dalam angka-angka dilaporan keuangan. Penerapan akuntansi konservatif dapat berupa menunda pengakuan aset dan keuntungan, di lain pihak menyegerakan mengakui hutang dan kerugian. Menurut Rohminatin (2016) juga mendefinisikan bahwa konservatisme merupakan prinsip bagi akuntan yang harus melaporkan informasi akuntansi baik aktiva dan pendapatan dari kemungkinan nilai dari kewajiban dan beban.

Glossary Financial Accounting Standard Board (FASB) Statement no.2 dalam Givoly & Hayn (2000) bahwa konservatisme adalah reaksi kehati-hatian (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian dengan maksud mengantisipasi resiko yang melekat yang akan berdampak pada exsistensi perusahaan dengan pertimbangan yang memadai. Untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan resiko yang melekat pada situasi bisnis telah cukup dipertimbangkan. Dengan adanya prinsip konservatisme tersebut diharapkan agar memberikan manfaat bagi setiap pemakai laporan keuangan. Selain itu, agar pemakai laporan keuangan bisa mengambil keputusan investasi dengan tepat

sesuai dengan prediksi yang mereka lakukan dari laporan keuangan yang memberi ketidakpastian dan juga resiko perusahaan.

Watts (2003) menguraikan tiga tujuan konservatisme, yaitu:

1. Antisipasi atas perilaku oportunistik manajer

Laporan keuangan merupakan media penyaluran informasi kepada pemangku kepentingan tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Investor dan kreditor seringkali mengandalkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Adanya konsumsi informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan dapat memunculkan kemungkinan manajer memainkan angka-angka dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam bingkai teori agency, manajer berpeluang memainkan angka-angka tersebut untuk kepentingannya sendiri. Penerapan akuntansi yang konservatif dapat membatasi perilaku oportunistik manajer.

2. Peningkatan nilai perusahaan

Penerapan akuntansi yang konservatif membuka kesempatan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Artinya perusahaan memiliki pertimbangan yang cukup tinggi untuk mengambil keputusan atas ketidakpastian yang terjadi. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang cenderung agresif akan dihindari oleh manajer.

3. Mencegah adanya potensi tuntutan hukum

Potensi tuntutan hukum muncul ketika manajemen menerapkan kebijakan yang agresif, termasuk dalam kebijakan akuntansinya. Penerapan

akuntansi yang konservatif dapat membatasi praktik-praktik akuntansi yang agresif. Hal ini ditujukan agar kemungkinan tuntutan hukum tidak terjadi.

2.3 Good Corporate Governance

Definisi *Good Corporate Governance* sesuai dengan surat keputusan menteri BUMN no. Kep-117/M/MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan praktik *GCG* pada BUMN yaitu : “Suatu Proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Good Corporate Governance diperlukan guna dapat mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer. Ada empat prinsip yang terdapat dalam *Good Corporate Governance*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. *Fairness* (Keadilan) yang meliputi: (a) Melindungi hak pemegang saham
(b) Kesetaraan perlakuan untuk seluruh pemegang saham
2. *Transparancy* (Transparansi) yang meliputi: (a) Informasi penting harus diungkapkan (b) Memenuhi unsur pembukuan yang berkualitas dengan mempersiapkan, mengaudit dan mengungkapkan informasi yang relevan.
(c) Informasi harus disebarakan secara adil, *real time* dan efisien.
3. *Accountability* (Dapat dipertanggungjawabkan) yang meliputi: (a) Dewan direksi bertindak untuk mewakili kepentingan entitas dan pemegang

saham (b) Independensi atas proses penilaian (c) Akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yang meliputi: (a) Penghormatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan (d) Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Nasution & Setiawan (2007) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder sesuai dengan kerangka peraturan. Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat mendukung pencapaian pengelolaan perusahaan yang lebih transparan untuk semua pemakai laporan keuangan. Apabila konsep *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik, maka diharapkan perbaikan dan peningkatan kinerja dapat terus dicapai seiring dengan transparansi dalam pengelolaan perusahaan yang dapat menguntungkan semua pihak.

Dalam penelitian ini, mekanisme unsur *Good Corporate Governance* yang dikaji adalah kepemilikan manajerial, komisaris independen, serta komite audit. Konsep dari ketiga variabel dijelaskan pada bagian berikutnya.

2.3.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai porsi saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya porsi kepemilikan saham oleh manajemen, maka hal tersebut dapat menjadi penyeimbang antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer. Sebab manajer juga turut serta memiliki saham perusahaan. Jadi keputusan yang diambil oleh manajer juga akan berdampak pada kepentingannya sendiri atas saham yang dimiliki. Sebagai contoh ketika diambil keputusan yang memculkan potensi resiko kerugian, maka manajer juga akan menanggung akibatnya sesuai porsi saham yang dimiliki. Dengan adanya kepemilikan manajer, maka akan dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer, yang berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin baik (Wiranata & Nugrahanti, 2013).

Dengan adanya kepemilikan manajerial yang besar memungkinkan penerapan akuntansi yang konservatif (Wardhani, 2008). Kepemilikan saham manajerial bisa mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan, salah satunya yaitu keputusan metode akuntansi yang digunakan adalah konservatisme akuntansi. Menurut Christiawan & Tarigan (2007) kepemilikan manajerial terwujud melalui presentase saham yang dimiliki manajer dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Manajer mempunyai wawasan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pemegang saham karena manajer ada di dalam perusahaan. Hal ini bisa berdampak merugikan bagi pemegang saham.

2.3.2 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang dipilih secara transparan dan independen, yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Artinya komisaris independen memiliki integritas dan kompetensi yang memadai dan diharapkan bertindak secara obyektif dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Peran dari komisaris independen adalah untuk menjaga keadilan serta memberikan keseimbangan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas serta para stakeholder lainnya. Oleh sebab itu, komisaris independen sangat memerlukan informasi yang berkualitas dan akurat guna untuk memonitoring jalannya operasi perusahaan.

Wardhani (2006) menyatakan bahwa problematika dari diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah potensi CEO mempunyai otoritas yang dominan dibanding dewan komisaris. Padahal sejatinya dewan komisaris berperan dalam mengawasi kinerja dewan direksi yang dikomandani oleh CEO. Independensi dalam komisaris dapat mendukung pengawasan dan fungsi penyeimbangan yang efektif.

2.3.3 Komite Audit

Nasution & Setiawan (2007) komite audit adalah komite yang diprakarsai oleh dewan komisaris. Komite ini ditujukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Komite audit juga berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pengelola perusahaan untuk menangani masalah pengendalian.

Menurut Wardhani (2008) menyatakan bahwa komite audit bertugas dalam membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Tidak hanya kedua fungsi tersebut, komite audit juga menjembatani pelaksanaan audit internal dan eksternal sesuai standar yang berlaku, dan memastikan adanya tindak lanjut manajemen atas temuan hasil audit yang dilaksanakan.

Komite audit seharusnya dapat menjamin terselenggaranya pelaporan keuangan yang kredibel. Peran tersebut dilakukan dengan memastikan bahwa pelaporan keuangan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, informasi keuangan yang akurat dan berkualitas dapat dihasilkan. Uraian diatas, menegaskan bahwa adanya komite audit dapat mendorong penerapan akuntansi yang konservatif.

2.3.4 Leverage

Leverage adalah rasio pendanaan yang menggambarkan presentase aset yang dibiayai oleh utang. Rasio ini menggambarkan kemampuan bayar perusahaan atas seluruh kewajibannya. Tingkat penggunaan hutang yang tinggi, akan cenderung menerapkan akuntansi yang konservatif. Karena kreditur berkepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan bisa menguntungkan bagi dirinya.

Ketika rasio *leverage* menunjukkan trend angka yang tinggi, maka perusahaan berpotensi melanggar perjanjian kredit. Sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi, yang bisa dilakukan

dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Oleh sebab itu, bukan hanya kreditur saja yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan melainkan *Good Corporate Governance* juga akan ikut berpartisipasi dalam penggunaan dana dari kreditur oleh pihak manajemen perusahaan. *Leverage* yang tinggi juga dapat memunculkan konflik antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Hal tersebut akan meningkatkan permintaan akuntansi yang konservatif (Ahmed & Duellman, 2007).

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme Akuntansi

Watts (2003) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi adalah salah satu mekanisme dalam membentuk kontrak yang efisien. Dengan penerapan konservatisme perusahaan akan lebih cepat dalam mengakui berita buruk dan tidak cepat dalam mengakui berita baik. Hal itu yang akan menyebabkan nilai yang disajikan dalam neraca lebih kecil dari nilai aktiva bersih.

Semakin besar proporsi saham pihak manajer maka laba yang dihasilkan akan semakin konservatif dikarenakan kepemilikan saham tersebut termotivasi manajer untuk tidak melakukan tindakan yang menurunkan nilai perusahaan. Hal itu diperkuat dengan penelitian Septian & Anna (2014) yang memperoleh temuan penelitian bahwa secara signifikan kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi.

Pratanda & Kusmuriyanto (2014) juga memperoleh hasil yang senada bahwa penerapan akuntansi konservatif dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kepemilikan manajerial. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa porsi

kepemilikan saham oleh manajer yang dominan dapat memicu penerapan akuntansi yang konservatif. Sejalan dengan hasil tersebut, Dewi & Suryanawa (2014) juga turut memperkuat argumen bahwa kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi

2.4.2 Komisaris Independen

Dalam menjalankan tugas fungsinya, komisaris independen membutuhkan informasi yang berkualitas, dalam hal ini memiliki keterandalan dan akurasi. Laporan keuangan yang disusun dengan memegang prinsip konservatisme dapat menjadi media yang efektif dalam mengawasi kinerja manajemen. Unsur *board of directors* yang di dalamnya terdapat fungsi komisaris independen akan sangat memiliki preferensi yang tinggi atas laporan keuangan yang berkualitas. Tentunya, preferensi ini akan mengarah pada penerapan akuntansi yang konservatif (Wardhani, 2008).

Penelitian Wardhani (2008) menyatakan bahwa porsi komisaris independen yang tinggi dalam jajaran dewan komisaris akan cenderung memiliki tingkat penerapan akuntansi konservatif yang tinggi pula. Peningkatan jumlah komisaris independen akan mendukung peningkatan penerapan akuntansi yang konservatif. Hasil penelitian Pratanda & Kusmuriyanto (2014) memperoleh kesimpulan bahwa komisaris independen mampu mempengaruhi konservatisme akuntansi secara signifikan. Hasil riset ini membuktikan bahwa porsi komisaris

independen yang semakin tinggi akan mengarahkan praktik akuntansi entitas pada prinsip konservatisme. Berdasarkan alur logis pernyataan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi

2.4.3. Komite Audit

Kehadiran komite audit berpotensi membuat proses pelaporan keuangan menjadi lebih baik. Ketika jumlah komite audit memadai, maka informasi yang akurat dapat dihasilkan. Jumlah komite audit yang hadir di jajaran *top management* akan lebih menghendaki praktik akuntansi yang konservatif agar menghasilkan informasi yang akurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin besar kecenderungan perusahaan menggunakan akuntansi yang konservatif (Brilianti, 2013).

Penelitian Wardhani (2008) memperoleh hasil bahwa komite audit secara signifikan memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Hasil riset ini berimplikasi pada kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka akan meningkatkan efektivitas dalam memastikan tercapainya pelaporan keuangan yang berkualitas. Penelitian Putra, Widanaputra, & Wisadha (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal ini berarti semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka tingkat konservatisme akuntansi perusahaan yang bersangkutan semakin tinggi. Dalam penelitian Fiasari (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap konservatisme akuntansi.

H3: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi

2.4.4 Leverage

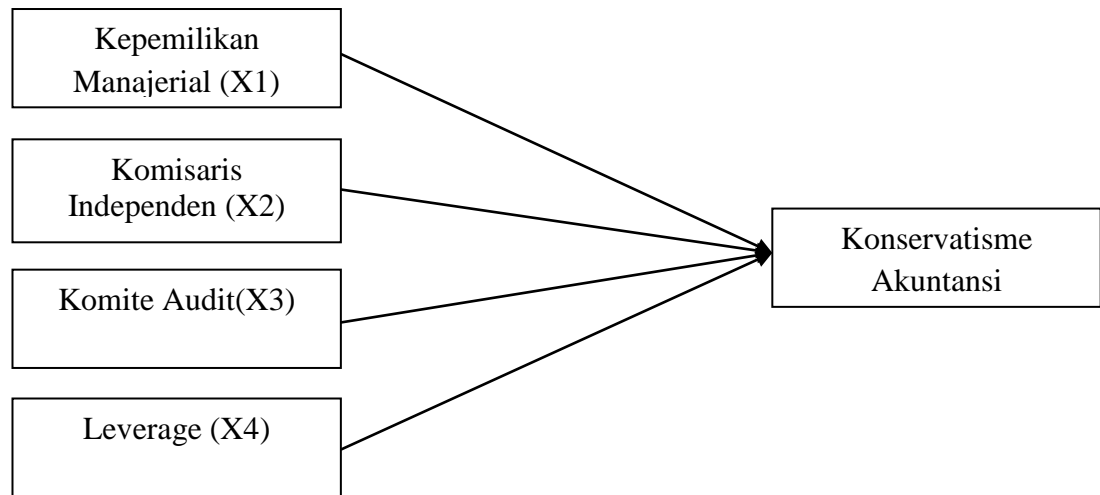
Dalam penerapan konservatisme, apabila semakin tinggi tingkat hutang maka pengakuan terhadap laba yang akan dilaksanakan oleh pihak manajemen secara lebih hati-hati dengan memperlambat pengakuannya (konservatis). Sebab pihak kreditur akan cenderung mengawasi penyelenggaraan operasi perusahaan. Hal ini berarti ketika porsi pendanaan yang berasal dari hutang berada pada level yang tinggi, maka perusahaan akan lebih menerapkan praktik akuntansi yang konservatif (Lo, 2005).

Riset Dewi & Suryanawa (2014) praktik akuntansi konservatif turut dipengaruhi oleh variabel *leverage*. Maksudnya adalah semakin tinggi rasio *leverage*, maka konservatisme akuntansi juga akan semakin tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, riset Alfian & Sabeni (2013) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hutang yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik akuntansi yang konservatif, yang tercermin pada angka-angka laporan keuangan. Penelitian Ramadona (2016) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi

2.5 Kerangka konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual